

Pemanfaatan Potensi Pesisir Melalui Ekonomi Biru Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Sabang & Jayapura

Kevin Pramudya¹, Almadina Puspita Dewi², Nanda Luthfi Yani³, Alvia Cahya Damar⁴, Hilman Amri⁵,
Shahibah Yuliani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan IPS, Universitas Negeri Jakarta

Corresponding Author: Kevin Pramudya e-mail: kevinpramudya207@gmail.com

Published: July , 2025

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru, terutama di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pengembangan ekonomi biru di wilayah pesisir Sabang, Provinsi Aceh dan Jayapura, Provinsi Papua sebagai upaya mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis terhadap artikel akademik, data statistik, serta laporan lembaga pemerintah dari tahun 2021–2024. Hasil studi menunjukkan bahwa ekonomi biru berkontribusi terhadap sektor perikanan, akuakultur, pariwisata bahari, energi laut terbarukan, dan bioteknologi kelautan. Studi kasus di berbagai wilayah pesisir seperti Jayapura dan Sabang yang menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika disertai dengan penguatan kelembagaan lokal, digitalisasi sistem kelautan, serta pendekatan berbasis keadilan dan hak-hak masyarakat adat. Namun demikian, implementasi ekonomi biru masih menghadapi tantangan berupa eksploitasi sumber daya, lemahnya kebijakan lintas sektor, keterbatasan teknologi, dan akses yang belum merata bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi biru dapat terwujud dalam pembangunan pesisir Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi biru, Jayapura, Sabang, wilayah pesisir, pembangunan berkelanjutan, kebijakan kelautan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki wilayah pesisir yang menyimpan kekayaan alam yang beragam. Indonesia dikategorikan sebagai negara maritim yang memiliki 17.504 pulau dan garis pantai yang panjangnya hingga 95.000 KM membuat Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan, ekowisata, industri maritim, jasa kelautan, pertambangan, dan sumber daya energi mineral yang kaya (Ashari, 2020). Namun, kekayaan alam yang melimpah tersebut jika tidak dikelola secara berkelanjutan dan tidak diintegrasikan dengan kebijakan yang efektif maka akan memicu hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan, dan menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat pesisir (Rifai & Haeril, 2024). Karenanya konsep ekonomi biru (*blue economy*) hadir untuk menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Konsep ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan seperti perikanan, kelautan, pariwisata wilayah pesisir, dan usaha lokal yang berhubungan dengan laut serta pesisir seraya melindungi keberlanjutan ekosistem lingkungan laut

(Bakti & Hakim, 2024). Dengan demikian ekonomi biru memiliki visi yang sejalan dengan SDGs ke-14 “Ekosistem Laut” yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan sehingga membangun ketahanan ekonomi masyarakat pesisir yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut di Jayapura dan Sabang masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi potensi tersebut. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut, seperti penangkapan ikan yang tidak terkendali dan konversi lahan pesisir untuk industri, telah menyebabkan degradasi lingkungan dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Tingkat eksploitasi perikanan (*over fishing & destructive fishing*) di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi, dengan 38% penangkapan ikan berlebihan yang melibatkan sekitar 600.000 kapal yang beroperasi tanpa pemantauan dan regulasi yang memadai. Selain itu, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak teratur, dan tidak dilaporkan (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUUF*) masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan (Alifa et al., 2024). Meskipun sektor maritim berpotensi besar, menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2024), kontribusi kemaritiman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbatas, hanya 7,6% dari total ekonomi nasional, angka yang tergolong rendah mengingat Indonesia memiliki 62% wilayah laut. Rendahnya angka ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemanfaatan sektor kelautan yang belum optimal, pengelolaan pulau-pulau kecil yang masih terbatas, maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, pencemaran lingkungan laut, rumitnya proses perundingan batas laut, serta adanya berbagai sengketa di ranah internasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya laut Jayapura dan Sabang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penerapan ekonomi biru secara sustainable menjadi solusi efektif dalam menjaga keberlanjutan ekologi laut sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kajian-kajian terdahulu mengenai ekonomi biru umumnya masih berfokus pada sektor-sektor spesifik seperti perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan laut, serta pada aspek politik luar negeri seperti yang dikaji oleh Polanunu dan Kusumaningrum (2022) yang menyoroti peran Indonesia sebagai *middle power* dalam forum-forum multilateral. Masih belum banyak penelitian yang menelaah secara mendalam terkait sinergi lintas sektor ekonomi, ekologi, dan sosial terutama dalam segi implementasi ekonomi biru di tingkat lokal. Contohnya studi di Distrik Fakfak Timur menunjukkan adanya potensi besar pengembangan ekonomi biru berbasis integrasi antara masyarakat adat suku Mbaham dan komunitas lokal tetapi juga mengungkapkan kesenjangan dalam aspek inovasi, jejaring, dan kapabilitas lintas sektor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian pada aspek perencanaan jangka panjang dan implementasi lapangan, khususnya terkait proses prinsip ekonomi biru dapat diimplementasikan secara simultan dan inklusif oleh pemangku kepentingan lokal.

Fokus utama penelitian ini adalah menjawab dua pertanyaan pokok yaitu sejauh mana rencana pembangunan ekonomi biru dapat diterapkan di wilayah pesisir Jayapura dan Sabang, serta bagaimana metode ini mampu mendorong pertumbuhan industri kelautan Jayapura dan Sabang. Pertanyaan pertama penting untuk menilai dampak nyata ekonomi biru terhadap pengembangan industri maritim, kontribusinya terhadap perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sementara itu, pertanyaan kedua membahas analisis kebijakan, hukum, dan praktik terbaik yang mendukung pemanfaatan potensi pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Pemilihan wilayah pesisir Jayapura dan Sabang sebagai fokus kajian dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam seperti ekosistem mangrove, perikanan, wisata bahari, dan energi terbarukan, yang berperan penting dalam pembangunan negara. Namun, potensi tersebut belum tergarap maksimal akibat tantangan seperti ketimpangan pembangunan, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan. Pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan diyakini dapat meringankan beban perekonomian kedua daerah tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Setyawati et al. (2021), terutama melalui pengelolaan ekosistem mangrove dan padang lamun yang berfungsi sebagai solusi alami terhadap perubahan iklim dan mendukung pembangunan ekonomi hijau.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, maka artikel ini memiliki tujuan yakni untuk membahas pemanfaatan potensi ekonomi biru di wilayah pesisir Sabang, Aceh dan Jayapura, Papua yang

mampu meningkatkan sektor kelautan terhadap pembangunan nasional serta membahas tantangan yang dihadapi pengembangan ekonomi biru di pesisir kedua wilayah tersebut. Dengan membahas hal tersebut, harapannya akan menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Penelitian juga akan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah pesisir Sabang dan Jayapura agar dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan potensi ekonomi biru di wilayahnya. Artikel ini juga dapat dijadikan sebagai bahan sumber bagi penelitian yang sejenis maupun penelitian baru yang akan dibuat. Harapannya agar masyarakat pesisir Sabang dan Jayapura dapat melihat peluang dari ekonomi biru sehingga bisa menjadi tambahan pemasukan bagi wilayah mereka maupun negara dalam mewujudkan pembangunan, namun dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis. Literatur yang digunakan bersumber dari online database Google Scholar, data publikasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen/laporan lembaga pemerintah yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Literatur yang dianalisis merupakan literatur yang terbit dari tahun 2021 hingga 2024 mengenai ekonomi biru di wilayah pesisir Jayapura dan Sabang. Sebanyak 10 artikel terpilih untuk menjadi sumber penelitian yang mencakup artikel penelitian kualitatif dan kuantitatif. Artikel ini menggunakan analisis deskriptif.

HASIL

A. Potensi Ekonomi Biru Di Wilayah Pesisir Sabang, Aceh

Kota Sabang, Provinsi Aceh memiliki banyak sekali potensi dalam mengembangkan ekonomi biru. Sabang merupakan wilayah yang kaya sekali akan sumber daya lautnya. Sebagai pariwisata bahari, Sabang mempunyai keindahan laut yang sangat menakjubkan, misalnya pantai yang indah, terumbu karang, dan kegiatan surfing yang menarik (Lestari & Suarja, 2023). Oleh karena itu, dalam memanfaatkan potensi ekonomi biru melalui pariwisata bahari ini pemerintah Aceh terus mengenalkan dan mempromosikan pariwisata bahari Sabang diikuti dengan melakukan perbaikan terhadap aksesibilitas, infrastruktur, dan lainnya yang mendukung kegiatan pariwisata bahari di Sabang. Selain pariwisata bahari, Sabang juga memiliki potensi ekonomi biru yakni menghasilkan energi terbarukan.

Sabang sangat berpotensi sekali untuk menghasilkan energi terbarukan, yakni energi angin dan energi laut. Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga angin telah diterapkan di Aceh dalam rangka untuk memanfaatkan potensi ini. Pengembangan dan penelitian terus dilakukan untuk dapat mengidentifikasi potensi energi laut, misalnya pemanfaatan energi gelombang laut dan arus laut (Lestari & Suarja, 2023). Sabang juga berpotensi dalam hal pengembangan inovasi teknologi bidang maritim. Teknologinya berupa pengembangan aplikasi teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memudahkan dalam hal koordinasi dan pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, teknologi pengolahan hasil laut yang lebih efisien dan ramah lingkungan juga termasuk yang dapat dikembangkan. Oleh sebab itu, pemerintah Aceh terus mendorong upaya untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan teknologi maritim tersebut untuk memudahkan masyarakat di Sabang atau wilayah pesisir lainnya.

B. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Memanfaatkan Potensi Ekonomi Biru di Wilayah Pesisir Sabang, Aceh

Potensi yang sudah dijelaskan pada poin diatas, sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menekankan pemanfaatan laut secara berkelanjutan untuk mendorong ekonomi dan menjaga kelestarian ekosistem. Namun, pariwisata bahari di wilayah ini mulai menghadapi berbagai permasalahan yang mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip keberlanjutan. Berdasarkan penelitian Anhar et al. (2024), gangguan terhadap perkembangan pariwisata

tersebut terutama muncul dari aspek lingkungan, yang disebabkan oleh maraknya aktivitas penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Hal ini, akan menjadi hambatan bagi kemajuan dan kesinambungan pariwisata bahari di Pulau Sabang karena praktik *destructive fishing* memberikan dampak negatif secara biologis yang berpotensi merusak habitat biota laut serta mengganggu biodiversitas perairan. Lalu praktik *destructive fishing* juga dapat mengurangi stok ikan, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan sumber daya ikan di perairan di wilayah tersebut. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi ketersediaan ikan konsumsi dan ikan hias, tetapi juga mendorong kenaikan harga kedua komoditas tersebut di pasar.

Permasalahan lainnya berdasarkan penelitian Lestari dan Suarja (2023), dalam konteks pembangunan Kota Sabang adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lemahnya iklim investasi, yang belum mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan pariwisata secara berkelanjutan. Permasalahan ini berdampak luas hingga ke sektor kelautan dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu, masalah lingkungan juga muncul akibat perencanaan pembangunan yang tidak tepat, seperti orientasi pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, perencanaan jangka pendek yang mengabaikan kepentingan generasi mendatang, lemahnya koordinasi antar sektor, serta penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.

C. Potensi Ekonomi Biru Di Wilayah Pesisir Jayapura, Papua

Wilayah pesisir Jayapura memiliki kekayaan sumber daya laut yang besar terutama di bidang perikanan dan pariwisata bahari. Berdasarkan data produksi tahun 2023, Jayapura menjadi penghasil tuna sirip kuning terbesar di Papua dengan produksi mencapai 15.984 ton per tahun. Jayapura juga mendukung keberlanjutan produksi perikanan tuna sirip kuning dengan nilai manfaat ekonomi total yang mencapai Rp 9,37 miliar. Komoditas unggulan lainnya antara lain cakalang dan udang. Adapun wilayah pusat kegiatan perikanan tangkap yang menopang ekonomi masyarakat lokal seperti Skouw Yambe, Enggros Tobati, Kampung Vietnam, dan Dok IX Base G. Potensi ini membuka peluang besar untuk pengembangan industri perikanan secara berkelanjutan berbasis ekonomi biru.

Selain perikanan terdapat ekosistem pesisir Jayapura lainnya seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Sumber daya tersebut berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus memiliki potensi ekowisata bahari. Kawasan wisata yang memiliki daya tarik utama dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat secara berkelanjutan seperti contohnya Pantai Base G, Hamadi, Holtekamp, dan Skouw.

Sektor ekonomi biru di Jayapura juga mencakup pengolahan hasil perikanan. Tidak hanya menjual hasil tangkapan secara segar, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah seperti fillet, sashimi, dan produk olahan beku. Pengembangan industri pengolahan ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai ekonomi dari sektor perikanan. Upaya pengembangan ekonomi biru juga melibatkan pengolahan limbah perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti tepung ikan untuk pakan ikan budidaya. Proses tersebut mampu mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus membuka peluang usaha baru yang lebih ramah lingkungan serta meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

D. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Memanfaatkan Potensi Ekonomi Biru Di Wilayah Pesisir Jayapura, Papua

Berdasarkan potensi yang dijelaskan di atas ternyata masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan potensi ekonomi biru di wilayah ini. Berdasarkan penelitian Mollet et al. (2024), sejumlah tantangan utama dalam pengembangan sektor perikanan laut meliputi rendahnya diversifikasi produk, terbatasnya akses pasar, serta degradasi lingkungan

akibat polusi laut dan praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti fasilitas penyimpanan dingin dan pelabuhan perikanan turut memperlemah daya saing nelayan lokal.

Di samping kendala struktural tersebut, tantangan sosial-ekonomi juga menjadi penghambat utama dalam optimalisasi ekonomi biru di Jayapura. Mayoritas nelayan di wilayah pesisir Jayapura masih bergantung pada metode penangkapan tradisional dengan keterampilan terbatas dalam pengolahan hasil laut pascapanen (Mollet et al., 2024). Minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam teknologi perikanan dan rendahnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan menyebabkan nelayan kesulitan meningkatkan nilai tambah produk. Selain itu, ketergantungan pada tengkulak atau perantara menyebabkan harga jual ikan menjadi rendah di tingkat produsen. Disparitas kesejahteraan juga terlihat dari rendahnya pendapatan rata-rata nelayan yang sebagian besar berada di bawah Rp4 juta per bulan.

E. Interpretasi Pelaksanaan Ekonomi Biru pada Wilayah Sabang dan Jayapura

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, peneliti memiliki asumsi bahwa pembangunan berkelanjutan ekonomi biru pada wilayah Sabang dan Jayapura masih terhambat oleh koordinasi lintas sektor yang lemah. Di Sabang, pengembangan pariwisata kelautan masih memiliki hambatan terutama pada aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak biota laut sehingga mengancam keberlanjutan pariwisata pesisir. Sementara di Jayapura, industri perikanan belum maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan degradasi lingkungan akibat adanya penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan.

Kemudian, masih adanya kesenjangan teknologi dan infrastruktur pada kedua wilayah tersebut. Sabang yang memiliki potensi besar pada energi terbarukan yang bersumber dari laut yaitu angin dan gelombang laut, terhalang dengan minimnya investasi yang dapat mendukung pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan tersebut. Di sisi lain, Jayapura juga menghadapi ketertinggalan teknologi dan infrastruktur yang memudahkan nelayan untuk menangkap ikan, hal ini ditandai dengan nelayan yang masih bergantung dengan metode penangkapan ikan tradisional dan terbatasnya pemahaman nelayan mengenai pengolahan ikan hasil laut pasca panen.

Butuh adanya pemahaman bagi nelayan bahkan generasi muda pada wilayah Sabang dan Jayapura mengenai potensi ekonomi biru dan pemanfaatan ekonomi biru yang berkelanjutan serta dapat menguntungkan berbagai sektor. Namun nyatanya masih kurangnya pemahaman mengenai ekonomi biru di kalangan anak muda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani et al., 2023) masih belum adanya pembahasan mendalam mengenai ekonomi biru pada buku teks IPS Kelas 7 karya M. Nursa'ban dkk. Buku teks yang dijadikan sumber rujukan dalam pembelajaran IPS kelas 7 tersebut hanya memuat materi mengenai potensi sumber daya kelautan dan penyebab perubahan potensi sumber daya laut yang dibahas secara ringkas dan tidak masuk dalam sub tema Perubahan Potensi Sumber Daya Alam Tema 3 Potensi Ekonomi Lingkungan. Hal tersebut menandakan perlu adanya pembahasan secara mendalam mengenai potensi ekonomi biru dan pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah sehingga generasi muda dapat bertanggung jawab dengan ekosistem pesisir, mengetahui tantangan yang mengancam ekosistem pesisir di masa depan, serta mengetahui kondisi sebenarnya masyarakat yang hidup di lingkungan pesisir.

Penerapan ekonomi biru di Indonesia, termasuk di wilayah pesisir Jayapura dan Sabang, juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar mampu mengelola sumber daya laut secara efisien dan adaptif terhadap tantangan global. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pengembangan sistem informasi kelautan berbasis digital yang terintegrasi antara pusat dan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengambilan kebijakan. Penggunaan teknologi digital seperti sistem monitoring kapal, pemetaan zonasi pesisir, serta e-logbook perikanan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya laut dan mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa hingga 2023 telah diterapkan sistem e-logbook perikanan pada lebih dari 5.000 kapal penangkap ikan berbobot di atas 30 GT, namun masih terdapat lebih dari 20.000 kapal skala kecil yang belum terintegrasi dalam sistem tersebut. Infrastruktur digital ini perlu diperkuat dengan dukungan kebijakan fiskal dan pembiayaan inklusif seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan, yang pada tahun 2024 telah mencapai penyaluran sebesar Rp4,2 triliun (Kemenko Marves, 2024), terutama bagi komunitas nelayan kecil agar mereka tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi maritim yang semakin berbasis teknologi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah (2024), pemanfaatan ekonomi biru juga sangat bergantung pada konsistensi dan kualitas kebijakan pemerintah, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang mendukung sektor kelautan. Ketidakkonsistenan regulasi serta perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat menghambat minat investor untuk menanamkan modal di sektor perikanan, khususnya di wilayah tertinggal seperti pesisir Jayapura dan Sabang. Hal ini turut memperburuk kondisi kesejahteraan nelayan lokal yang pendapatannya sebagian besar masih berada di bawah Rp4 juta per bulan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk reformasi kelembagaan sektor kelautan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Kebijakan tersebut dapat mencakup transfer ilmu dan teknologi perikanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberian subsidi teknologi seperti alat tangkap ramah lingkungan, sarana pelayaran, pengolahan hasil laut, dan akses bahan bakar. Langkah-langkah ini penting agar nelayan kecil tidak semakin tertinggal dalam transformasi ekonomi biru yang berbasis inovasi dan efisiensi teknologi.

KESIMPULAN

Ekonomi biru memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Sabang dan Jayapura. Sabang unggul dalam pariwisata bahari dan energi terbarukan, sementara Jayapura kuat di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut. Meski potensinya besar, kedua wilayah masih menghadapi kendala seperti destructive fishing di Sabang, keterbatasan infrastruktur dan keterampilan nelayan di Jayapura, serta minimnya literasi ekonomi biru di masyarakat. Data juga menunjukkan bahwa 38% perikanan di Indonesia mengalami overfishing, dan hanya 7,6% kontribusi sektor maritim terhadap PDB nasional. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, dibutuhkan kebijakan yang konsisten, digitalisasi sistem kelautan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta sangat penting agar ekonomi biru dapat menjadi strategi yang efektif dan inklusif dalam membangun wilayah pesisir secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Alifa, N. N., Zahidi, M. S., & IP, S. (2024). Pengembangan ekonomi biru sebagai strategi Indonesia menuju ekonomi maju. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 38(1), 48-65.
- Anhar, T. F., Naufal, A., Syahputra, F., Nurhayati, N., & Handayani, L. (2024). SOSIALISASI DAMPAK DESTRUCTIVE FISHING TERHADAP KEBERLANJUTAN SEKTOR WISATA BAHARI DI BATEE SHOK, SUKAMAKMUR, SABANG. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kauniah*, 2(2), 14-25.
- Ashari, A. P. (2020). Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Wilayah Perairan Kota Makassar. repository.unhas.ac.id. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13401/>
- Bakti, S., & Hakim, L. N. (2024). Ekonomi biru dan kepemimpinan strategis: Mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Kalianda Halok Gagas*, 7(1), 1–18.
- Badan Pusat Statistik. (2024, October 9). Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2020-2024.

- Dewi, K. E. S., Fatah, A. A., & Arkan, M. M. (2021). Responding to the Economic Potential of European Fishery Products Market and Environmental Protection Demands.
- Husni, S., & Sarjan, M. (2024). TINJAUAN PERSPEKTIF FILSAFAT: KEBIJAKAN EKONOMI BIRU UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR. *JURNAL AGRIMANSION*, 25(2), 396–406.
- Hutajulu, H., Lobo, A. N., & Haryati, K. (2022). Valuasi ekonomi ekosistem sumberdaya pesisir dan laut terhadap perikanan tuna sirip kuning di Kota Jayapura. *AKULTURASI*, 10(1), 194–208.
- Hutajulu, H., Marlianingrum, P. R., Lobo, A. N., & Haryati, K. (2021). Analisis Tekno Ekonomi Pemanfaatan Limbah Tuna Berbasis Ekonomi Biru Di Kota Jayapura . *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(1), 17–29.
- Indahyani, R., Hutajulu, H., Yawa, J. J. B., & Samosir, R. K. (2024). Strategi Pengelolaan Perikanan Tuna dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kota Jayapura. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1093–1100.
- Kemenko Marves. (2024). Kemenko Marves: Literasi Maritim Perlu Ada Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi. <https://Www.Maritim.Go.Id/Detail/Kemenko-Marves-Literasi-Maritim-Perlu-Ada-Dalam-Kurikulum-Perguruan-Tinggi>.
- Khoiriyah, A. Z. (2024). Implementasi Ekonomi Biru Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1331–1356.
- Lestari, S., & Suarja, Z. A. (2023). Blue ekonomi: dampak perencanaan anggaran terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. *JECS Journal Of Economic Science*, 9(1).
- Mollet, J. A., Titalessy, P. B., & Zuhendri, Z. (2024). The Blue Economy Approach and Development of Marine Fisheries Potential in the Coastal Region of Jayapura City. *Society*, 12(2), 835–858.
- Nasim, E. S. (2025). Enhancing Marine Tourism Management as a Blue Economy Strategy to Boost Community Welfare in Jayapura City, Papua Province. *Majalah Ilmiah Bijak*, 22(1), 26–37.
- Yuliani, S., Maryani, E., Nurbayani, S., & Disman, D. (2023). Analysis of Blue Economy”Contents in Junior High School Social Science Book. *Jurnal Pendidikan IPS*, 13(1), 131–139.